



Kandidat Diminta Pro Transparansi



YAN CIKAL

Gubernur Rano Karno cipika cipiki dengan Andika Hazrumy setelah menghadiri pelantikan Adde Rosi Khoirunissa sebagai Wakil Ketua DPRD Banten di ruang rapat Paripurna DPRD Banten, Senin (4/4).

Cegah Merebaknya Korupsi di Pemrov Banten

SERANG-Selain persoalan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, transparansi publik dan anggaran dinilai menjadi isu strategis yang perlu menjadi perhatian besar dari para bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017.

Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Banten Ade Jahran mengatakan, transparansi menjadi salah satu bagian penting yang harus dikampanyekan dalam pilgub. "Kita berharap isu transparansi didorong oleh para calon

gubernur," katanya kepada *Radar Banten*, Senin (4/4).

Menurutnya, selain sebagai komitmen para calon pemimpin Banten, transparansi sebagai jalan untuk meminimalkan terjadinya tindak kejahatan korupsi. "Korupsi itu kan lahir dari sesuatu yang ditutupi, kalau mereka bisa komitmen terhadap transparansi, ini bisa meminimalisasi korupsi," kata Ade.

Kata dia, transparansi berjalan baik ketika dimulai dari pemimpin tertinggi. "Memang kadang kala pimpinannya sudah transparan, tapi bawahannya enggak. Setidaknya dengan komitmen yang dibangun oleh gubernur terpilih nanti, bisa menjadi titik dimulai untuk membangun pemerintahan yang bersih di Banten," ujar pria yang akan meluncurkan buku berjudul *Transparansi Setengah Hati* pada (20/4) mendatang.

Ke hlm 9



KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Media/Koran : Radar Banten
Hari/Tanggal : Selasa, 5 April 2016
Halaman Koran : 1 dan 9

Kandidat Diminta...

Ia mengatakan, transparansi publik dan anggaran bukan persoalan yang sulit. Sebab, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Ini hal wajib yang harus dijalankan. Di sana juga sudah jelas juklak-juknisnya, baik itu informasi yang boleh dan dikecualikan. Jadi aparaturnya pemerintah tidak perlu khawatir," katanya.

Menurutnya, komitmen pemimpin daerah dalam mendorong transparansi, dapat meningkatkan kinerja menuju pemerintahan yang bersih. Secara langsung partisipasi publik dalam pembangunan di Banten juga akan ikut terbangun. "Saya pikir ini hal yang mudah. Pemerintah tinggal menyiapkan web informasi apa saja yang memang perlu diketahui masyarakat tanpa harus diminta. Tapi memang transparansi itu butuh proses yang perlu didorong oleh semua pihak dan komitmen dari para pemimpinnya," ujar Ade.

Pihaknya mengaku, akan meminta penyelenggara Pilgub Banten untuk memasukkan materi transparansi publik dan anggaran sebagai materi debat kandidat. "Nanti kita akan usulkan ke KPU. Tujuannya untuk melihat sejauh mana komitmen para calon" ujarnya.

Dihubungi terpisah, Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mendukung langkah KIP Banten dalam mendorong isu transparansi publik dan anggaran. "Saya kira itu bagus, nanti kita akan sampaikan kepada pasangan calon untuk memasukkan isu itu (transparansi publik-red) menjadi item yang perlu disampaikan," katanya.

Pihaknya mengaku isu transparansi sebagai salah satu materi debat kandidat Pilgub mendatang. "Karena ini menjadi upaya kita mendorong lahirnya pemimpin yang transparan," tambahnya.

Seperti diketahui, Minggu (3/4) lalu, DPD PDI Perjuangan melakukan *fit and propper test* atau uji kelayakan dan kepatutan kepada para kandidat yang mendaftar sebagai cagub dan cawagub di PDI Perjuangan Banten. Di antaranya Andika Hazrumy, Mulyadi Jayabaya, Ahmad Taufik Nuriman (ATN), dan Tb Haerul Jaman.

Dari hlm 1

Dari hasil pemaparan mereka, selain isu pelayanan dasar, pemerataan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, isu transparansi anggaran juga mereka munculkan. "Dalam transparansi anggaran ini agar masyarakat tahu secara langsung dan ikut terlibat aktif dalam pengawasan kebijakan pembangunan," kata Andika.

RANO IKUTI FIT AND PROPPER TEST

Petahana Rano Karno kemarin mengikuti *fit and propper test* yang dilaksanakan DPD PDI Perjuangan di kantor DPP PDI Perjuangan Banten. Selama satu jam, pria yang masih aktif menjabat sebagai gubernur ini menjalani tes tersebut. "Kita melangkapi semua berkas yang masih kurang. Semua sudah, dan tetap dijalankan mekanismenya," kata Rano se usai uji kelayakan.

Terkait program yang akan dijalankan jika kelak terpilih, Rano enggan menjawab secara pasti. Menurutnya, terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. "Visi misi kan harus sebagai bagian yang diminta. Tapi silakan tanya (tim penguji DPP PDI Perjuangan-red). Terlalu banyak soalnya. Kalau yang prioritas antar saya kasih yah, disalin saja," kilahnya.

Rano mengaku akan mengikuti tahapan lain yang sudah disiapkan partai, termasuk sekolah partai. Namun, ia seakan masih malu-malu menjawab jika PDI Perjuangan memberikan peluang besar untuk mengusunginya. "Kan restu belum diputuskan, artinya pilihan tergantung masyarakat," ujarnya.

Ketua DPD PDI Perjuangan M Sukira mengatakan, Rano menyampaikan beberapa pokok pikiran. "Di antaranya mengenai pelayanan dasar. Mulai dari peningkatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan," ujarnya.

Kata dia, semua kandidat yang mendaftar masih memiliki kans yang sama untuk mendapat restu dari PDI Perjuangan. "Keputusan akhirnya ada di DPP. Nanti semuanya juga diundang untuk *fit and propper test* dan tes psikologi di Jakarta. Mereka pasti diundang ke sana, dan diundangnya juga berkali-kali," kata Sukira. (mg04/alt/ags)